

### **Dinamika Perimbangan Kekuatan China dan India di Selat Malaka**

#### *The Dynamics of China and India's Balance of Power in the Strait of Malacca*

**Ramdhan Muhaimin<sup>1\*</sup>, Putri Yasmin Martsela<sup>2</sup>**

Universitas Al-Azhar Indonesia

Email: ram.muhamin@gmail.com

Diterima 03 Januari 2024 | Direvisi 12 Februari 2024 | Diterbitkan 20 Maret 2024

#### **ABSTRACT**

*This paper aims to analyze the balance of power in Southeast Asia between India and China, especially in the Malacca Strait. The strait is one of the most dynamic concentration points in the struggle for influence of the world's great powers, because of its strategic position connecting Asia, Australia, and the Pacific region. Both countries have political and economic interests in the Strait of Malacca. Both countries also have grand strategies and defense policies based on economic growth. India has a Look East Policy, while China has a Soft Power Policy. The presence of both in Southeast Asia greatly influences the perception and behavior of ASEAN countries. This research uses qualitative methods that are exploratory with literature study techniques. The theory used in this paper is the balance of power in the neorealism approach.*

**Keywords:** *Balance of Power, China, India, Malacca Strait, Neo-realism*

#### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan menganalisa perimbangan kekuatan di Asia Tenggara antara India dan China, terutama di titik Selat Melaka. Selat tersebut merupakan salah satu titik konsentrasi yang cukup dinamis dalam perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dunia, karena posisinya yang strategis menghubungkan Asia, Australia, dan kawasan Pasifik. Kedua negara memiliki kepentingan politik dan ekonomi terhadap Selat Malaka. Kedua negara juga memiliki strategi besar politik luar negeri dan kebijakan pertahanan yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi. India memiliki kebijakan *Look East Policy*, sementara China memiliki Kebijakan Kekuatan Lunak (*Soft Power*). Kehadiran keduanya di Asia Tenggara sangat mempengaruhi persepsi dan perilaku negara-negara ASEAN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat eksploratif dengan teknik studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah perimbangan kekuatan (*Balance of power*) dalam pendekatan neorealisme.

**Kata kunci:** *China, India, Neorealisme, Perimbangan Kekuatan, Selat Malaka*

## PENDAHULUAN

India dan China adalah dua negara besar yang mempunyai kepentingan strategis di kawasan Asia Selatan termasuk samudera India. Rivalitas kedua negara sudah cukup lama, dan berdampak terhadap kondisi dinamika geopolitik hingga ke Asia Tenggara, termasuk Selat Malaka (Singh, 2023; Donnellon-May, 2023; Hang et al., 2021). Bagi India, Selat Malaka menjadi laut-penghubung (*sea-link*) dari samudera India melalui laut Andaman ke negara-negara di Asia Tenggara. Hubungan India dengan kawasan Asia Tenggara sudah sejak lama, baik hubungan dagang, ekonomi, budaya, ataupun politik. Begitupun hubungan dengan kekuatan-kekuatan Asia Timur yang juga terhubung melalui selat ini. India mempunyai kebijakan maritim yang menegaskan keharusan terjaminnya keamanan di sepanjang jalur laut dari Samudera India hingga Samudera Pasifik. Hal yang sama juga berlaku dalam pandangan China yang mempunyai kepentingan strategis terhadap keamanan di Selat Malaka. Oleh sebab itu, Selat Malaka dan kawasan Asia Tenggara secara umum menjadi wilayah persaingan pengaruh kekuatan-kekuatan besar dan regional.

Berdasarkan sejarah hubungan kedua negara, India dan China seringkali terlibat dalam konflik, terutama konflik perbatasan (Ayres, 2020; Singh, 2023; BBC, 2022). Konflik kedua negara yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II mampu mempengaruhi dinamika geopolitik di Asia. Karena kedua negara mempunyai sumber kekuatan nasional yang sama-sama melimpah (*Comprehensive National Power/CNP*) (Bajwa, 2008). Isu utama kedua negara adalah kompetisi dalam mempertahankan pengaruh dan keamanan di wilayah perbatasan, baik di daratan ataupun lautan. Dalam konteks perbatasan laut (*maritime boundary*), kedua negara mempunyai kebijakan luar negeri dan pertahanan yang tidak dapat dikompromikan. Seperti di era Perang Dingin, China sangat jelas berpihak terhadap Uni Soviet, sementara India berada pada blok lain.

Keduanya mempunyai kepentingan strategis dan keamanan yang sama terhadap penguasaan lautan. Dalam hal ini, India mempunyai kepentingan terhadap Samudera India yang menjadi jalur penghubung ekspor-impor dari Afrika dan Timur Tengah menuju ke Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Pasifik. Begitupun dengan China yang juga berkuasa atas Laut China Selatan atau bagian barat Samudera Pasifik. Kepentingan strategis kedua negara di lautan terlihat sangat jelas seperti dalam isu keamanan maritim di Selat Malaka. Persaingan India-China terjadi tidak selalu ditunjukkan dalam hubungan konfrontatif, tetapi terkadang dalam bentuk ‘kompetisi halus (*soft competitive*)’ melalui sejumlah kerjasama.

Menurut Kripa Sridharan (1996), beberapa faktor penting penyebab keterlibatan kepentingan India di kawasan Asia Tenggara adalah budaya, strategis, ekonomi, dan suku (*ethnic*). Hal yang mendorong kehadiran kepentingan India di Asia Tenggara adalah juga karena kehadiran negara-negara besar (Sridharan, 1996), termasuk kehadiran China dan Amerika Serikat (AS).

Sedangkan China juga melihat Asia Tenggara sebagai kawasan penting dan strategis untuk memperluas pengaruh, diplomasi kerjasama, dan strategi pertahanan. Para sarjana Hubungan Internasional terkadang menyebut perkembangan pengaruh China di Asia Tenggara, sebagai penggunaan kekuatan ‘soft power’ - diplomasi, bantuan asing, perniagaan, dan investasi (Lum et al., 2008). Dalam konteks China, *soft power* yang dimaksud adalah merangkumi keuntungan-keuntungan ekonomi, penyebaran norma dan nilai, kerjasama pada isu-isu non-tradisional, saling menguntungkan antara pariwisata dan pendidikan, diplomasi dan gaya hidup, dan jaringan di antara masyarakat China yang tersebar (*Chinese overseas*) (Bronson, 2007). Kehadiran kepentingan China di Asia Tenggara juga terlihat dengan sangat jelas melalui mega proyek negeri Ginseng tersebut dalam program yang disebut Belt and Road Initiative (BRI) (Chen & Zhou, 2021; Yu Ji, 2021). BRI adalah rencana ambisius China untuk mengembangkan dua rute perdagangan baru yang menghubungkan China dengan seluruh dunia. Inisiatif ini lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur. Mega proyek ini merupakan upaya China mengembangkan pasar yang diperluas dan saling bergantung untuk China, menumbuhkan kekuatan ekonomi dan politik China, dan menciptakan kondisi yang tepat bagi China untuk membangun ekonomi teknologi tinggi.

Namun ada hal yang juga lebih penting bahwa kehadiran China di Asia Tenggara adalah sebagai *balance of power* terhadap kekuatan lainnya seperti Amerika Serikat yang telah lebih dulu. Kehadiran China yang menjadi faktor sebab kehadiran India di kawasan tersebut. Dalam point ini, ada kesamaan dalam tujuan politik luar negeri India dan China yakni perebutan pengaruh Asia Tenggara. Kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara di Asia Tenggara merupakan penggambaran dari *balance of power* antara yang satu dengan lainnya: India *balancing* China, China *balancing* AS, India *balancing* AS (Hang et al., 2021). Bahkan kedua negara memiliki kepercayaan diri memiliki warisan kebudayaan (*culture heritage*) yang besar sebagai kekuatan regional (*regional power*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksploratif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*). Dalam naskah ini, penulis menjelaskan studi kasus secara lengkap berdasarkan pada data-data yang terhimpun tentang kekuatan China dan India di Selat Malaka. Kerangka konsep (*conceptual framework*) penelitian ini adalah pendekatan neo-realisme khususnya teori tentang Perimbangan Kekuatan (*Balance of Power*) dan Persepsi Ancaman (*Threat Perceptions*). Dengan menggunakan kerangka konsep tersebut naskah ini berusaha menjelaskan mengenai perimbangan kekuatan (*Balance of Power*) antara China dan India di Selat Malaka. Bagaimana dua kekuatan besar tersebut dapat mempertahankan eksistensi dan hegemoni kekuatan mereka di Selat Malaka serta juga dapat menciptakan persepsi ancaman (*Threat Perceptions*) dari adanya dua kekuatan besar antara China dan India tersebut.

Selat Malaka merupakan lokasi strategis menjadi tempat 'perebutan' negara-negara di dunia, tak terkecuali China dan India. Kedua negara tersebut mencoba untuk 'menguasai' Selat Malaka demi kepentingannya. Dari kepentingan tersebut, kemudian menciptakan *balance of power* untuk menyeimbangkan kekuatan diantara kedua negara besar tersebut yang pada akhirnya bisa menimbulkan berbagai persepsi ancaman (*threat perceptions*) yang berdampak pada China, India, dan area kawasan Selat Malaka tersebut. Adapun demi kepentingannya, kedua negara melibatkan negara-negara ASEAN dalam perluasan pengaruh. Persepsi ancaman menjadi sentral dari teori tentang perang, pencegahan (*deterrence*), aliansi, dan resolusi konflik. Ancaman dalam konteks ini pada awalnya dipersepsikan dengan kekuatan militer, tetapi para sarjana kemudian khususnya setelah Perang Dingin, melihat sumber ancaman yang muncul tidak saja dalam bentuk kemampuan militer. Konteks persepsi dalam teori ini lebih menggambarkan situasi dinamika psikologis. Para sarjana hubungan internasional yang bergelut juga dalam psikologi politik mengeksplorasi istilah "persepsi" dengan memperhatikan perbedaan antara apa yang para pemimpin anggap sebagai ancaman dan apa yang ditunjukkan oleh pembuktian niat dan kemampuan militer (Rousseau & Garcia-Retamero, 2007; Stein, 2017). Persepsi ancaman (*threat perceptions*) yang terbentuk bisa bersumber dari berbagai kepentingan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut, baik China ataupun India. Faktor kepentingan utama dari China dan India di Selat Malaka adalah mengenai keamanan. Keamanan termasuk dalam kepentingan strategis kedua negara di lautan terlihat sangat jelas seperti dalam isu keamanan maritim di Selat Malaka.

Selain itu, India memiliki kepentingan budaya, strategis, ekonomi, dan suku (*ethnic*). Begitupun China yang juga memiliki kepentingan kawasan dan strategis untuk memperluas pengaruh, diplomasi kerjasama, dan strategi pertahanan di Asia Tenggara. Selat Malaka yang berada di jalur Asia Tenggara ini tentunya memiliki dampak ataupun ancaman lainnya, selain dari isu keamanan maritim berdasarkan pada faktor kepentingan-kepentingan lain.

Perimbangan kekuatan adalah kebijakan suatu negara atau sekelompok negara yang melindungi dirinya dari negara atau kelompok negara lain dengan mencocokkan kekuatannya dengan kekuatan pihak lain. Negara dapat menerapkan kebijakan perimbangan kekuatan dengan dua cara: dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, seperti ketika terlibat dalam perlombaan persenjataan atau dalam perolehan wilayah secara kompetitif; atau dengan menambah kekuatan mereka sendiri pada kekuatan negara lain, seperti ketika memulai kebijakan aliansi (Walt, 1985). Dari adanya kepentingan-kepentingan tersebut, China dan India mengeluarkan berbagai macam kebijakan serta tindakan lainnya sebagai upaya untuk tidak hanya dilakukan dengan hubungan konfrontatif, melainkan melalui kerja sama yang berdasarkan pada teori *balance of power*. China yang lebih dahulu dikategorikan sebagai negara Asia Timur yang hadir dengan kekuatan besar di Asia Tenggara, kemudian India hadir untuk menyeimbangkan kekuatan China tersebut demi kepentingannya yang kemudian bisa menciptakan berbagai persepsi ancaman (*threat perceptions*) di kawasan Selat Malaka tersebut.

Dari metode penelitian dan teori *balance of power* tersebut, penulis menjelaskan arah kekuatan China dan India di Selat Malaka dari perspektif neorealisme. Kemudian penulis menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan kedua negara tersebut, baik China maupun India untuk bisa mengamankan kepentingannya di Selat Malaka.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pertahanan India Dan China Terhadap Asia Tenggara**

#### **a. Kebijakan Pertahanan India**

Kebijakan pertahanan dan luar negeri India secara garis besar dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu aturan-aturan Inggris, gerakan anti-kekerasan yang digagas Mahatma

Ghandi, dan warisan kebudayaan India (Singh, 2004; Banerjee, 2014; Jain, 1998; Sharma, 2001). Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru terpengaruh oleh doktrin strategi Ghandi untuk membuat kebijakan keamanan dan pertahanan terhadap pelbagai kepentingan nasional India. Khususnya dalam menyikapi situasi politik Perang Dingin, Nehru mengembangkan doktrin tentang hidup berdampingan secara damai (*peaceful co-existence*) dalam menyikapi sikap politik agresif China. Selama Perang Dingin juga, India menjadi oposisi bagi blok-blok yang bertikai. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan India sebagai salah satu inisiator dibentuknya *Non-Alignment Movement* atau Gerakan Non-Blok. Usaha keras India tersebut sebagai wujud nyata dari implementasi diplomasi luar negeri *peaceful co-existence*. Namun seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat, India mengembangkan kebijakan luar negeri dan pertahanan aktif. Bahkan selama era kepemimpinan setelah Perang Dingin, India menjadi lebih dekat kepada AS untuk mengimbangi Pakistan di regional Asia Selatan. AS membekali India persenjataan militer dan teknologi nuklir, sementara persenjataan dan teknologi nuklir Pakistan disuplai oleh China.

India secara nyata telah membangun kerjasama pertahanan yang erat dengan negara-negara ASEAN terutama Indonesia, Singapura, Vietnam dan Filipina (Mayilvaganan, 2021). Diplomasi pertahanan India di ASEAN harus dilihat dalam konteks pertumbuhan penetrasi China di kawasan. Terutama adalah penetrasi yang dilakukan di Samudera India hingga Selat Malaka. India seringkali menyatakan bahwa diplomasi pertahanan yang dibuatnya di kawasan tersebut tidak diarahkan terhadap satu negara manapun. Namun pada masa bersamaan, diplomasi kerjasama pertahanan dengan negara-negara ASEAN seringkali menimbulkan kecemburuan China. Pemerintah India selalu berargumen untuk menunjukkan bahwa latihan militer di sekitar Laut Andaman – yang besebelahan dengan Selat Malaka - sebagai bentuk pelaksanaan *India's Look East Policy* dalam dimensi pertahanan untuk menjamin keselamatan jalur perdagangan laut di mana terdapat konvergensi kepentingan semua negara (Mayilvaganan, 2021).

India memberikan perhatian sangat besar dalam perkara keamanan di lautan, terutama jalur perdagangan dari masuknya penetrasi kekuatan-kekuatan besar. Perhatian yang besar dari India juga disertai dengan peningkatan dan penambahan kemampuan persenjataan angkatan lautnya. Perdana Menteri India Narendra Modi telah menjadikan kebijakan modernisasi militer sebagai salah satu prioritas utama sejak pemerintahnya berkuasa pada

bulan Mei 2015 lalu (Choudhury, 2015; Hang et al., 2021). Segera setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintah Modi mulai memberi peluang kepada perusahaan asing untuk menginvestasikan hingga 49% saham dalam industri pertahanan dalam negeri. Sebelumnya, perusahaan asing hanya diizinkan untuk memiliki hingga 26% saham di perusahaan patungan militer.

Bukti keseriusan pemerintah Modi dalam kebijakan ini dengan meningkatkan jumlah anggaran belanja militer India pada tahun fiskal akan datang hingga 11 persen, yang mencapai USD 40 miliar, atau setara dengan Rp 544 triliun. Peningkatan anggaran itu sebagai rencana India untuk melanjutkan investasi dalam perluasan dan modernisasi kekuatan militer (Choudhury, 2015).

Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengatakan pemerintah juga telah mengalokasikan sekitar 160 miliar rupee (sekitar Rp 33 triliun) meningkat dari 94 miliar rupee (sekitar Rp 20 triliun) untuk peningkatan kapasitas kekuatan kapal-kapal Angkatan Laut India. India menjadi negara importir persenjataan militer terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kapasitas kekuatan militer India untuk menghadapi eskalasi hubungan dengan Pakistan dan sebagai respons terhadap perkembangan kekuatan militer China (Choudhury, 2015).

#### **b. Kebijakan Pertahanan China**

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan pertahanan China, maka sebaiknya melihat kepada Buku Putih Pertahanan Nasional China (*White Paper of China's National Defense*) salah satunya yang diluncurkan pada Januari 2009. China kembali mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Nasional tahun 2015. Dalam buku putih yang dikeluarkan Dewan Negara itu, China berambisi meningkatkan perlindungan laut terbuka. Beijing juga mengecam negara-negara tetangga yang dianggap provokatif di wilayah karang dan kepulauan yang diklaimnya di Laut China Selatan. Dokumen berjudul “Strategi Militer China” yang terdiri lebih dari 9.000 kata itu menggarisbawahi prinsip-prinsip pertahanan, pertahanan diri, dan serangan balasan. “China tidak akan menyerang kecuali diserang, tapi kami pasti akan melakukan serangan balik jika diserang” (Cheng, 2015).

China, yang memprotes AS yang mengirim pesawat pengintai di Laut Cina Selatan, dalam buku itu mengecam negara luar yang sibuk mengurus urusan Laut China Selatan, seperti melakukan pengintaian dari laut dan udara melawan China. China menyatakan

dokumen itu dibuat untuk menyesuaikan diri dari perkembangan perang modern dan tuntutan keamanan nasional (Cheng, 2015; Ciorciari, 2017; Zhao, 2021).

Berdasarkan buku putih tersebut, sektor pembangunan ekonomi dan sektor strategi pertahanan menjadi dua sektor yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah China dalam menentukan pembangunan sektor ekonomi harus mendukung kepada pengembangan dan pemoderenan sektor pertahanan dan militer. Oleh sebab itu, dapat difahami jika perkembangan luar biasa ekonomi China lebih dari dua dekade terakhir setelah Perang Dingin juga disertai dengan fenomena kebangkitan militernya (Radityo et al., 2019; Zhao, 2021).

Pemerintah Xi Jinping mengatakan pada 5 Maret 2023, pengeluaran militer negaranya meningkat pada laju tercepat dalam empat tahun, menimbang eskalasi ancaman yang juga “meningkat” dari luar negeri. Peningkatan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia terjadi ketika Beijing mengumumkan tujuan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen untuk tahun tersebut. China menempatkan pengeluaran pertahanan sebesar 1,55 triliun yuan (\$ 225 miliar), kenaikan 7,2 persen dan tingkat kenaikan tercepat sejak 2019. Tingkat pertumbuhannya 6,6 persen pada 2020, 6,8 persen pada 2021 dan 7,1 persen pada 2022. Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan kepada delegasi Kongres Rakyat Nasional (NPC) bahwa “upaya eksternal untuk menekan dan menahan China terus meningkat” (Global Security, 2023).

Kebijakan China terus meningkatkan anggaran belanja pertahanannya memicu kecurigaan negara-negara tetangga. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing mengambil kebijakan tegas terkait sengketa maritim dengan Jepang dan beberapa negara Asia Tenggara. Kebijakan ini semakin mengarah kepada peningkatan ketegangan regional. Merepons kebijakan pertahanan China, Jepang turut meningkatkan anggaran belanja militernya. Begitupun dengan India yang masih mempunyai masalah sengketa perbatasan dengan China (BBC, 2023).

China membuat satu kebijakan pertahanan nasional yang memang semata-mata untuk pertahanan. China menempatkan perlindungan terhadap kedaulatan nasional, keamanan, integrasi wilayah, kepentingan pembangunan nasional, dan kepentingan rakyat China di atas yang lain. China berusaha untuk membangun satu benteng pertahanan nasional dan kekuatan

militer yang kuat dan sejalan dengan kepentingan keamanan dan pembangunan nasional, serta memperkaya negara dan memperkuat militer sambil membangun masyarakat yang sejahtera di semua aspek (*China's National Defense 2008, 2009*).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, China memainkan peranan yang semakin meningkat di dalam bidang politik regional dan internasional. Dalam buku putih tersebut memang dijelaskan secara khusus mengenai kebijakan luar negeri dan pertahanan China terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara, khususnya di Laut China Selatan. Keterlibatan China dalam beberapa organisasi regional juga cukup memberi penjelasan karena kerjasama-kerjasama yang dibangun juga merangkumi aspek keamanan dan pertahanan.

Pemerintah China secara aktif terlibat dalam kerjasama keamanan dan pertahanan *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*. Sejak dua tahun lalu, negara-negara anggota SCO menandatangani kerjasama latihan bersama angkatan militer, kerjasama menteri-menteri pertahanan, dan kerjasama memerangi perdagangan senjata ilegal.

Untuk kawasan Asia Tenggara, China juga memainkan peranan penting dalam *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Bahkan bersama dengan Indonesia dan Thailand juga menggelar diskusi mengenai keamanan maritim di Asia Tenggara, termasuk Selat Malaka dan Laut China Selatan, dalam forum *ARF Round Table Discussion on Stocktaking of Maritime Security Issues*. China juga aktif memainkan peranan di ASEAN plus three – ASEAN, China, Jepang, dan Korea Selatan - dan Asia East Summit (EAS) yang meliputi China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan New Zealand, termasuk juga negara-negara ASEAN (Lum et al., 2008).

Selama Perang Dingin, China mengadopsi strategi pertahanan yang didasarkan pada perlindungan terbatas pada perairan pantainya. Angkatan Laut China mengadopsi doktrin angkatan laut Uni Soviet yang menyerukan penggunaan kapal-kapal selam, kapal torpedo dan kapal pantai lainnya yang didukung oleh pesawat yang beroperasi hanya di dalam batas-batas pantai.

Setelah Perang Dingin, China mulai memoderenisasi angkatan laut dengan sungguh-sungguh, mengubahnya dari kemampuan angkatan laut yang bersifat *brown-water* ke *blue-water* yang mampu mencapai ratusan mil dari perairan pantai ke perairan internasional dan Laut China Selatan, serta tumbuh dari pertahanan angkatan laut yang pasif ke postur pertahanan angkatan laut aktif (Zubir & Basiron, 2007).

## Kompetisi Kekuatan Di Selat Malaka

Kehadiran China dan India di Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, adalah gambaran perimbangan kekuatan (*Balance of Power*) (Pevenhouse, 2007). Sejak berakhirnya Perang Dingin, paradigma mengenai konsep keamanan (*security*) mengalami perubahan. Tidak terkecuali pada negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, di mana keamanan tidak selalu merujuk kepada arti yang berdasarkan pada faktor militer (*concept of traditional security*), tapi juga keamanan harus dilihat berdasarkan kepada faktor ekonomi dan keamanan manusia (*concept of non-traditional security*).

Perubahan paradigma ini berpengaruh kepada perubahan perilaku politik negara-negara dalam melakukan strategi perimbangan kekuatan (*balance of power*), dimana politik keseimbangan (*balancing politics*) tidak selalu harus berbentuk pada menampilkan kekuatan militer. Tapi politik keseimbangan dapat dilakukan dengan pembangunan kekuatan ekonomi dan perluasan pengaruh budaya.

Dalam konteks di Selat Malaka, India dan China melakukan strategi politik *balance of power* antara satu dengan lainnya. Politik penyeimbang yang dilakukan kedua negara bukan saja saling unjuk kekuatan militer, tetapi juga penetrasi budaya dan ekonomi untuk menguasai Selat Malaka dengan melakukan diplomasi pertahanan terhadap negara-negara pesisir (*litoral states*) seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura. Negara-negara Asia Tenggara secara umum melihat AS, China, Jepang, dan India sebagai aktor-aktor yang dapat memainkan peranan sebagai kekuatan penyeimbang antara satu dengan lainnya, dengan melibatkan ASEAN sebagai aktor mitra yang penting. Secara geo-politik dan geo-ekonomi, negara-negara di Asia Tenggara ini memandang India sebagai alternatif kekuatan ekonomi baru di Asia yang mampu mengimbangi kekuatan ekonomi China. Pandangan ini sebagai upaya memperluas referensi kebergantungan negara-negara Asia Tenggara kepada kekuatan-kekuatan besar dunia. Pada dasarnya, beberapa negara di Asia Tenggara bahkan melihat bahwa ASEAN perlu melakukan kerjasama dengan kekuatan-kekuatan besar (Devare, 2006).

Bahkan kehadiran China menjadi faktor pertimbangan penting yang mendorong India untuk juga hadir di Asia Tenggara. Dengan kata lain, *China's factor* menjadi pendorong terbangunnya hubungan India dengan Asia Tenggara. Pada tahun 1990-an setelah Perang Dingin, China mulai mengembangkan dan menerapkan konsep baru mengenai keamanan

(*a new concept of security*), dimana konsep tersebut meluaskan definisi mengenai keamanan yang juga merangkumi aspek politik, pertahanan, diplomatik, dan semua yang di atas pertimbangan ekonomi (Devare, 2006b).

Bagi China, pembangunan bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan daripada pembangunan bidang militer dan pertahanan. Karena itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam dua dekade terakhir, China juga membangun militernya untuk memperkuat sistem dan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara. Begitupun dengan India yang juga mempunyai kepentingan nasional terhadap Selat Malaka. Tidak hanya China, India juga merupakan negara pengguna Selat Malaka. Tidak kurang daripada 30 persen komoditas perdagangan India melalui selat ini setiap tahunnya. Kejadian-kejadian yang terjadi di selat ini sangat terkait dengan kawasan perairan India di Samudera India. Oleh sebab itu, India menjadi perlu secara kritis memantau dan mengontrol setiap lalu lintas kapal-kapal di selat tersebut, khususnya kapal China, dan di selat lain di Asia Tenggara. Persaingan China dan India di Selat Malaka memang berlangsung dalam bentuk yang halus dan tidak langsung.

India sebetulnya telah lama melakukan pembangunan strategis dan militer di Laut Andaman dan pulau Nicobar. Bahkan beberapa kali India melakukan latihan militer di kawasan ini. Pembangunan tersebut demi mencapai tujuan kepentingan nasional India terhadap keselamatan Selat Malaka. Hal ini tentunya membuat ketidaknyamanan China yang juga mempunyai kepentingan sama di kawasan tersebut. Bahkan beberapa analis China menyebutkan, perkembangan yang terjadi di Laut Andaman adalah sebagai ambisi India untuk menjadi 'polisi penjaga' bagi Selat Malaka (Xuegang, 2007). Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh para pembuat kebijakan strategi India terhadap ambisi China untuk menjadi '*great power*' di Selat Malaka.

Pada bulan September 2007, India ikut berpartisipasi dalam *five-nation Malabar-07-2*, yaitu latihan bersama angkatan laut terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Samudera India. Latihan yang awalnya ditujukan sebagai "anti-pembajakan (*anti-piracy*)" itu dilakukan di daerah yang berdekatan dengan Selat Malaka. Strategi India ini sudah cukup menjadi alarm bagi China. Bahkan latihan besar-besaran itu diberitakan oleh media sebagai "message to China", dan dikaitkan dengan latihan militer besar-besaran serupa '*Peace Mission 2007*' yang dilakukan hanya sebulan sebelumnya dalam *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO) (Khurana, 2008). China dan India telah berusaha memperluas pengaruh

politik-diplomatik terhadap negara-negara pesisir yang berdampingan dengan Selat Malaka. Bagi India dan China, mempengaruhi secara diplomatik negara-negara di sekitar Selat Malaka menjadi sangat penting dan strategis.

Dalam pergulatan pengaruh, kedua negara telah menggunakan berbagai cara, termasuk kerjasama pertahanan dengan negara-negara di sekitar Selat Malaka. Malaysia menjadi negara yang paling didekati oleh China. Sebab dalam pandangan China, Malaysia menjadi negara yang paling terkena dampak akibat berbagai kejahatan maritim di Selat Malaka dibandingkan dengan negara pesisir lainnya, yaitu Indonesia dan Singapura. Karena itu, pada September 2005 China berani melakukan perjanjian pertahanan dengan menandatangani MoU penjualan peralatan militer ke Kuala Lumpur (People's Daily Online, 2005).

India juga menggunakan angkatan lautnya untuk keterlibatan politik-diplomatik dengan negara-negara pesisir Selat Malaka (*littorals*). Satu hal yang penting adalah penggunaan pertama kali kapal induk *INS Viraat* yang melalui Selat Malaka pada tahun 2005. Kapal tersebut melakukan kunjungan ke Port Klang (Malaysia) diteruskan ke Singapura dan Jakarta (Indonesia). Bahkan beberapa bulan sebelumnya, Angkatan Laut India telah melakukan operasi bantuan berskala besar untuk membantu korban bencana Tsunami di Aceh. Tidak hanya itu, India menjadi negara donator terbesar yang memberikan bantuan dengan total nilai sebanyak US \$ 60.46 juta.

Perilaku dan kebijakan China dan India di Asia Tenggara menunjukkan pengaruh yang signifikan dari pergerakan sistem internasional yang anarki. Sehingga kedua negara melakukan kebijakan saling mengimbangi kekuatan dan pergelaran kekuatan militer, yang didasarkan pada saling curiga terhadap potensi ancaman masing-masing sehingga membentuk sikap untuk bertahan dan mempertahankan kedaulatan. Dalam kajian Hubungan Internasional, perilaku demikian disebut neo-realisme (Jemadu, 2008).

Dalam konsep persepsi ancaman (*threat perceptions*) (Tilman, 1987), sejarah konflik antara dua negara yang bertikai tidak akan hilang begitu saja, malah berpotensi sebagai ancaman antara satu negara dengan satu negara lainnya meskipun kedua negara menjalin hubungan harmonis pada masa-masa setelahnya. Persepsi ancaman yang terjadi di antara

India dan China membawa kepada ambisi penguasaan pada lautan yang berhimpitan dengan kedua negara. Persepsi ancaman ini yang membawa kepada praktik *Balance of Power* di Selat Malaka.

Ancaman (*threat*) suatu negara berkaitan dengan kebijakan luar negeri negara lain yang bersumber dari keamanan nasional (*national security*) negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara berpengaruh kepada negara lain dan seringkali kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai ancaman. Jika pada masa Perang Dingin, ancaman-ancaman yang dihadapi selalu datang dari eksternal negara, maka pada masa kini ancaman-ancaman dapat berasal dari domestik dan global (Perwita & Yani, 2005). Bahkan pada era tersebut juga, ancaman yang datang dari eksternal negara selalu bersifat tradisional, yaitu militer. Sifat ancaman yang dapat mengancam suatu negara mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan globalisasi dan perubahan dinamika struktur internasional. Dengan demikian, permasalahan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, persekitaran, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari segi dimensi sejarah, India-China pernah terlibat perang. Di era Perang Dingin, kedua negara terlibat konflik perbatasan di daratan. Konflik pada tahun 1962 yang dikenal sebagai *Sino-Indian War*. Konflik tersebut bermula pada persengketaan wilayah kedaulatan yang diklaim oleh kedua negara, yaitu wilayah *Aksai Chin* dan *Arunachal Pradesh*. Wilayah *Aksai Chin* diklaim India sebagai bahagian daripada wilayah Khasmir dibawah pemerintahan India. Sedangkan China mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Xinjiang dibawah pemerintahan China. Wilayah *Aksai Chin* merupakan jalur strategis bagi China yang menghubungkan wilayah Selatan Tibet dan Xinjiang (Ayres, 2020). Persepsi ancaman yang muncul akibat perang ini terbawa kepada perebutan pengaruh kedua negara di Selat Malaka khususnya, dan Asia Tenggara umumnya.

Dari segi dimensi ekonomi, tidak diragukan lagi pertumbuhan ekonomi kedua negara melaju pantas setelah berakhirnya Perang Dingin. Masuknya India dan China ke dalam ekonomi global sejak dua dekade terakhir abad ke-20 membawa pengaruh signifikan terhadap perubahan dalam kehidupan manusia (Latif, 2007). Perubahan ekonomi China di akhir tahun 1970-an membawa perubahan radikal dalam hubungan internasional. Begitupun dengan India yang mulai bangkit sejak berakhir Perang Dingin tahun 1990-an. Persaingan

kedua negara besar di Asia itu bukan saja baru terjadi di abad moden. Pada tahun 1700-an, pendapatan ekonomi kedua negara tersebut setara dengan keseluruhan negara di Eropa (Latif, 2007). Bahkan dalam *grand strategy* China disebutkan bahwa negara berpenduduk lebih dari satu miliar ini berambisi menjadi kekuatan militer dan ekonomi di Asia Pasifik pada tahun 2010-2015 mendatang (Kanwal, 2007).

Dari segi dimensi sosio-budaya, bangsa India dan China sudah sejak berabad-abad lampau mempunyai hubungan sosial dan budaya dengan kawasan di Asia Tenggara. Karena itu, tidak mengherankan jika di Asia Tenggara pun banyak dijumpai suku, budaya dan agama yang serupa dengan di India dan China. Usaha perluasan pengaruh budaya kedua bangsa itu disebutkan sebagai '*Pax Sinica*' dan '*Pax Indica*' (Kanwal, 2003).

Sedangkan secara geopolitik, kedudukan India dan China sangat strategis dimana keduanya bersebelahan dengan samudera atau lautan yang menjadi jalur perniagaan barang sejak berabad-abad lampau, yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik. Dari penelusuran dimensi-dimensi persepsi ancaman (*threat perceptions*) tersebut, sehingga dapat difahami sebab-sebab terjadinya persaingan kekuatan antara kedua negara melalui *balance of power* di Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka. Selain Asia Tenggara, perebutan pengaruh keduanya juga terjadi di regional lain.

## KESIMPULAN

India dan China menjadi dua negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di kawasan Asia. Keadaan tersebut menjadikan India dan China mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, baik diperingkat regional maupun internasional. Kedua negara mempunyai sumber kekuatan nasional yang sama-sama melimpah dan menyeluruh (*Comprehensive National Power/CNP*). Dengan CNP yang dimiliki, kedua negara seringkali saling melakukan politik penyeimbang (*balancing politics*) antara satu dengan lainnya melalui *balance of power* di berbagai regional, termasuk di Selat Malaka, Asia Tenggara.

Sebab-sebab kebijakan pertahanan kedua negara untuk melakukan *balance of power* di Selat Malaka dapat dianalisa melalui pendekatan konsep persepsi ancaman (*threat*

*perceptions*). Berdasarkan pendekatan konsep ini, India dan China mempunyai kesamaan darisegi sejarah, ekonomi, geo-politik, dan sosio-budaya yang menyebabkan keduanya akan melakukan politik *balance of power*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayres, A. (2020). *The China-India Border Dispute: What to Know*. Council On Foreign Relations. <https://www.cfr.org/in-brief/china-india-border-dispute-what-know>
- Bajwa, JS. (2008). Defining Elements of Comprehensive National Power. *CLAWS Journal: Summer*.
- Banerjee, D. (2014). India ' s Defence and Security in the 21st Century : Hard Choices. *CLAWS Journal: Summer*, 1–16.
- BBC. (2015). *China military budget "to rise 10%."* BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-31706989>
- BBC. (2022). *India-China dispute: The border row explained in 400 words*. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-asia-53062484>
- Bronson, P. (2007). *The Dragon Looks South: China and Southeast Asia in the New Century*. *Wesport: Praeger Publishers*, 111–112.
- Chen, P., & Zhou, Y. (2021). The Asian Infrastructure Investment Bank and How China is Financing BRI. *BCP Business & Management*, 16, 63–69. <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v16i.250>
- Cheng, D. (2015). *Fundamental Change in China's Defense Perspective Suggested by Newest White Paper*. *The Heritage Foundation*. [http://thf\\_media.s3.amazonaws.com/2015/pdf/IB4428.pdf](http://thf_media.s3.amazonaws.com/2015/pdf/IB4428.pdf)
- China's National Defense 2008*. (2009). Information Office of the State Council of the People's Republic of China.
- Choudhury, S. (2015). *India Increases Military Budget By 11% to Nearly \$40 Billion*. Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/articles/india-increases-military-budget-by-11-to-nearly-40-billion-1425124095>
- Ciorciari, J. D. (2017). ASEAN and the great powers. *Contemporary Southeast Asia*, 39(2), 252–258. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xz0m3.9>
- Devare, S. (2006). *India and Southeast Asia: Towards Security Convergence*. : ISEAS Publishing.

- Donnellon-May, G. (2023). *How Sino-Indian Rivalry is Shaping South Asian Geopolitics*. Oxford Global Society. <https://oxgs.org/2023/01/25/how-sino-indian-rivalry-is-shaping-south-asian-geopolitics/>
- Global Security. (2023). *China Military Spending Budget*. Global Security. <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm>
- Hang, L. T., And, N., Le, N., & Thuong, T. (2021). India–China Competition in South Asia Under Prime Minister Narendra Modi’s Administration. *The Journal of Indian and Asian Studies*, 02(01), 2150001. <https://doi.org/10.1142/S2717541321500017>
- Jain, BM. (1998). India’s Defence and Security Intra-regional Dimension. *Jaipur: Ina Shree Publishers*, 28. [https://scholar.google.com/scholar?cluster=4255700038646113471&hl=en&as\\_sdt=2005&sciodt=2007](https://scholar.google.com/scholar?cluster=4255700038646113471&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=2007)
- Jemadu, A. (2008). *Politik Global dan Teori & Praktik*. Graha Ilmu.
- Kanwal, G. (2003). *China’s Defence Strategy and Military Posture dalam Jasjit Singh*. KW Publishers.
- Kanwal, G. (2007). *China’s Defence Strategy and Military Posture dalam Jasjit Singh*. : KW Publishers.
- Khurana, C. G. S. (2008). *Indian Defence Review*. Indian Defence Review. <https://www.indiandefencereview.com/idr-new-website/>
- Latif, A. I. (2007). *Between Rising Powers: China, Singapore, and India*. ISEAS Publishing.
- Lum, T., Morrison, W. M., Vaughn, B., Affairs, F., & Division, T. (2008). China ’ s “ Soft Power ” in Southeast Asia. *Asian Affairs*, 1.
- Mayilvaganan, M (Ed.). (2021). *ASEAN and India–ASEAN Relations: Navigating Shifting Geopolitics*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003177173>
- People’s Daily Online. (2005). *PLA Navy Fleet Conducts Anti-pirate Exercises at Malacca Straits*. People’s Daily Online. [http://en.people.cn/200205/29/eng20020529\\_96696.shtml](http://en.people.cn/200205/29/eng20020529_96696.shtml)
- Perwita, A. A. B., & Yani, M. Y. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Rosda Karya.
- Pevenhouse, J. S. G. & J. C. (2007). *International Relations: Brief Edition 2006-2007*. New York: Pearson Longman.

- Radityo, F., Rara, G., Amelia, I., & Efrain, R. (2019). Geopolitik Tiongkok Di Kawasan Asia Tenggara: Jalur Perdagangan (Obor). *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(1), 84. <https://doi.org/10.33541/japs.v3i1.1073>
- Rousseau, D. L., & Garcia-Retamero, R. (2007). Identity, power, and threat perception: A cross-national experimental study. *Journal of Conflict Resolution*, 51(5), 744–771. <https://doi.org/10.1177/0022002707304813>
- Sharma, H. (2001). Security Imperatives for India in the Emerging Geopolitical Environment. *India Quarterly*, 57(1), 1–38. <https://doi.org/10.1177/097492840105700101>
- Singh, A. (2023). *Revisiting India's China Challenge – The Diplomat*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2023/10/revisiting-indias-china-challenge/>
- Singh, B. (2004). INDIA ' S SECURITY CONCERNS : NATIONAL , REGIONAL AND GLOBAL. *The Indian Journal of Political Science*, 65(3), 345–364.
- Sridharan, K. (1996). *The ASEAN Region in India's Foreign Policy*. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=8797688>
- Stein, J. G. (2017). Threat Perception In International Relations. *University Surrey*. <https://www.surrey.ac.uk/politics/research/researchareasofstaff/isppsummeracademy/instructors-Threat-Perception-in-International-Relations>
- Tilman, R. O. (1987). *Southeast Asia And The Enemy Beyond: ASEAN Perceptions of External Threats*. Westview.
- Walt, S. M. (1985). Alliance Formation and the Balance of World Power. In *International Security* (pp. 3–43).
- Xuegang, Z. (2007). Southeast Asia and Energy: Gateway to Stability. *China Security*, 3(2), 21.
- Yu Ji, J. W. (2021). *What is China's Belt and Road Initiative (BRI)?* Chatham House – International Affairs Think Tank. <https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri>
- Zhao, M. (2021). The Belt and Road Initiative and China–US strategic competition. *China International Strategy Review*, 3(2), 248–260. <https://doi.org/10.1007/s42533-021-00087-7>
- Zubir, M., & Basiron, M. N. (2007). The Straits of Malacca: the Rise of China, America's Intentions and the Dilemma of the Littoral States. *Kuala Lumpur: Maritime Institute of Malaysia*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07266472.2005.10878774>